

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang Masalah**

Salah satu dari tujuan pendidikan nasional seperti ada pada UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur serta memungkinkan para warganya untuk mengembangkan diri, baik yang berhubungan dengan jasmaniah maupun rohaniah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan merupakan salah satu investasi untuk meletakkan dasar bagi kejayaan bangsa pada masa depan. Pendidikan merupakan suatu tolak ukur yang tinggi pada peradaban dari suatu bangsa, karena dari sistem dan proses pendidikanlah maju mundurnya suatu bangsa dapat dinilai. Seringkali arti penting mengenai pendidikan pada penerapan sistem pendidikan di Indonesia cenderung masih mewakili budaya verbalisme yang menghasilkan lulusan yang kurang kreatif, inovatif, kurang memiliki tanggung jawab serta kurang mampu untuk mengantisipasi perubahan dunia yang begitu cepat.

Untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang diharapkan sesuai dengan tujuan nasional maupun tujuan sekolah, maka setiap sistem pendidikan atau sekolah memerlukan kurikulum yang berfungsi sebagai alat untuk mencapainya. Oleh karena itu kurikulum memegang peranan yang sangat penting didalam membina kemampuan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan yang diharapkan . Soedijarto (1997:11) mengemukakan bahwa unsur terpenting dalam

pendidikan sekolah ialah sistem kurikulumnya, karena itu kurikulum adalah unsur yang paling penting dan strategis dari sistem pendidikan sekolah.

Permasalahan besar yang masih dihadapi oleh pendidikan nasional kita adalah masalah mutu, relevansi, efektivitas dan efisiensi pendidikan. Masalah-masalah ini menimbulkan keresahan pada masyarakat yang seringkali terdengar dalam diskusi, seminar dan kegiatan lainnya.. Keresahan yang berupa bahwa pendidikan kita masih rendah mutunya, kurang relevansinya dengan kebutuhan pembangunan, kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, harus ditanggapi secara sungguh-sungguh dan dipecahkan secara komprehensif dan terpadu demi suksesnya pendidikan dan ini akan mempunyai dampak terhadap suksesnya pembangunan bangsa dan negara kita.

Natsir mengatakan (Muhamad Joko 2007:3) mengatakan bahwa pembangunan pendidikan di Indonesia sekurang-kurangnya menggunakan empat strategi dasar, yakni : *Pertama* pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. *Kedua*, relevansi. *Ketiga*, peningkatan kualitas, dan *keempat* efisiensi.

Dalam hal pemerataan pendidikan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan bagi semua usia sekolah. Sejalan dengan kemajuan zaman, sekolah sebagai lembaga pendidikan semakin banyak menghadapi tantangan, salah satu tantangan itu adalah masalah mutu pendidikan. Persoalan pendidikan yang terkait dengan masalah rendahnya mutu pendidikan yang ada pada setiap jenjang dan satuan pendidikan(sekolah), khususnya pada pendidikan dasar dan menengah telah membangkitkan berbagai pihak untuk melakukan peningkatan kualitas pendidikan, walaupun disadari bahwa usaha peningkatan pendidikan bukan merupakan masalah yang sederhana.

Usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan terus-menerus telah dilakukan baik secara konvensional maupun secara inovatif. Pemerintah telah melakukan upaya penyempurnaan sistem pendidikan, baik melalui penataan perangkat lunak maupun perangkat keras, di antara upaya tersebut adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 dan Nomor 25 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang secara langsung mempunyai pengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Pada intinya dari Undang-Undang tersebut adalah, pada sebelumnya pengelolaan pendidikan merupakan wewenang pusat (*sentralistik*), maka dengan berlakunya Undang-Undang tersebut pengelolaan pendidikan diserahkan kepada sekolah dan daerah (*desentralistik*). Pemberian otonomi pendidikan yang luas kepada sekolah merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum.

Undang-Undang No.22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2000 berimplikasi terhadap kebijaksanaan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik ke desentralistik. Perubahan pengelolaan tersebut merupakan upaya pemberdayaan daerah dan sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah dan menyeluruh. Wujud dari pelaksanaan desentralisasi pendidikan dalam bidang kurikulum yaitu pembuatan kurikulum oleh daerah dan sekolah.

Pemberian otonomi pendidikan ini menuntut pendekatan kurikulum yang lebih kondusif di sekolah agar dapat lebih mengakomodasi semua keinginan dan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, untuk mendukung

kemajuan serta sistem yang ada di sekolah. Dalam rangka itulah maka Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ditawarkan sebagai kurikulum alternatif.

Dalam KTSP, pendidik dan sekolah atau satuan pendidikan diberi otonomi dalam menjabarkan kurikulum, dan siswa sebagai subyek dalam proses belajar mengajar. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas Standar isi, Proses, Kompetensi lulusan, Tenaga kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, Pembiayaan dan Penilaian Pendidikan. Dua dari kedelapan Standar Nasional Pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

Diharapkan implementasi KTSP dapat memenuhi standardisasi belajar siswa. KTSP berdasarkan SNP berlaku pada jalur pendidikan formal dan nonformal jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) dan menengah (SMA dan SMK), dan disusun oleh satuan pendidikan atau kelompok dengan hanya mengacu kepada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP).

Implementasi KTSP menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas , agar dapat membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisiensikan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih. Selain itu, juga dituntut kemandirian dan kreativitas sekolah dalam mengelola pendidikan dan pembelajaran, sekolah harus mampu

mencermati kebutuhan peserta didik yang bervariasi. KTSP memberi peluang bagi kepala sekolah, guru dan siswa untuk melakukan inovasi improvisasi di sekolah yang berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial dan lain-lainnya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas dan profesionalisme yang dimiliki.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sudah mulai diterapkan pada sekolah-sekolah di Indonesia sejak tahun 2006 seperti SD, SMP, SMA dan SMK. Jika diterapkan mulai pada tingkat kelas awal, maka saat ini paling tidak di SD sudah sampai pada siswa kelas 2, SMP kelas 8, dan SMA/SMK pada siswa kelas 11. Hal yang berbeda dari KTSP dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia sebelumnya adalah kurikulum tersebut dikembangkan oleh satuan pendidikan sendiri. Pengembangannya dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, tetapi tetap mengacu pada standar nasional pendidikan. Pemerintah menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagai acuan yang harus diikuti setiap satuan pendidikan. Standar isi dan standar kompetensi lulusan yang kemudian dioperasionalkan ke dalam KTSP dapat dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2006/2007 dan selambat-lambatnya pada tahun 2009/2010.

Sekolah boleh belum melaksanakan KTSP pada tahun pelajaran 2009/2010 dengan izin dari Menteri Pendidikan Nasional. Sekolah yang sudah melaksanakan uji coba KBK atau Kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat melaksanakan KTSP secara serentak pada seluruh tingkat kelas mulai tahun pelajaran 2006/2007 (Permen Diknas. No. 24 tahun 2006 pasal 2).

Pemerintah telah mengupayakan pelaksanaan KTSP ini melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, pelatihan pengembangan, maupun penataran-penataran pada tingkat nasional

maupun daerah-daerah, sehingga sampai saat ini kurikulum tersebut sudah tersebar cukup merata di sekolah-sekolah.

Pada awalnya banyak keraguan tentang pelaksanaan kurikulum tersebut di lapangan, seperti dikatakan Prof. Mansyur Ramly pada Internet (2007) yang menjelaskan seiring dengan diberlakukannya KTSP, pada masa transisi ini banyak sekolah yang belum menerapkan kurikulum buatan sendiri. Masalahnya banyak guru yang tidak tahu bagaimana menyusun kurikulum model KTSP. Oleh karena itu, lanjut Ramly, sambil menunggu kesiapan guru dan tenaga pelaksana di lapangan, Balitbang Depdiknas telah menyediakan dua paket kurikulum model KTSP, yakni model umum yang berisi kerangka acuan dan model kurikulum lengkap yang langsung bisa diaplikasikan di sekolah. Dijelaskan bahwa banyak guru yang kebingungan dengan model KTSP karena sudah lama guru menerima kurikulum dalam bentuk jadi dari pemerintah pusat. Padahal, KTSP menuntut kreativitas untuk menyusun model pendidikan yang sesuai dengan kondisi lokal. Sekarang, setelah berselang masa selama 3 tahun sekolah melaksanakan KTSP, bagaimana kondisi di lapangan?. Apakah sekolah dengan kreativitas gurunya sudah mengembangkan kurikulum secara mandiri?. Kalau belum, apa masalahnya?. Bagaimana kemungkinan solusi dari masalah tersebut?.

Secara umum, masih ada hambatan dalam implementasi KTSP. Persoalan yang umumnya dialami oleh sekolah dalam implementasi KTSP menurut keluhan di sekolah adalah pemahaman yang belum maksimal dari warga sekolah, terutama guru, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai. Surat Kabar Kompas (11 September 2006) pada buku Muhammad Joko Susilo (2007:169), bahwa "Sejumlah sekolah mulai berusaha menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan

yang mengacu pada Standar Isi yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Sosialisasi dan pelatihan-pelatihan pun mulai diselenggarakan. Namun sejauh ini guru dan sekolah sebagai pelaksana masih meraba-raba penerjemahan kurikulum tersebut. Mereka juga khawatir kekurangan buku pegangan sebagai bahan ajar". Sehubungan dengan hambatan dalam implementasi kurikulum ini juga Sukmadinata pada buku Mulyasa (2008:6) mengatakan : "Hambatan utama dalam pengembangan kurikulum di sekolah terletak pada guru itu sendiri". Selanjutnya menurut Mulyasa (2008:6) mengatakan bahwa : "Disamping itu, implementasi kurikulum dalam kegiatan pembelajaran di sekolah juga sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber belajar, sarana dan prasarana yang memadai, terutama kondisi ruang pembelajaran, perpustakaan, laboratorium, dan alat bantu pembelajaran.". Selanjutnya menurut Mulyasa bahwa :

" Apa yang dikemukakan diatas, perlu lebih ditekankan dalam implementasi KTSP, karena kelemahan dan hambatan implementasi kurikulum di sekolah seringkali bersumber dari persepsi yang berbeda diantara komponen-komponen pelaksana di lapangan(kepala dinas,pengawas,kepala sekolah dan guru, serta kurangnya kemampuan menerjemahkan kurikulum ke dalam operasi pembelajaran". Dengan demikian dalam implementasi kurikulum termasuk KTSP akan ditemui hambatan-hambatan dalam berbagai faktor, baik faktor guru sebagai peran utama maupun faktor lainnya sebagai penunjang. Sesuai dengan pernyataan ini Faojin mengungkapkan dalam internet (Oktober 2008) sebagai berikut :

"Kini usia pemberlakuan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sudah memasuki tahun keempat sejak diberlakukan tahun ajaran 2006--2007. Dan diharuskan pada tahun ajaran 2009--2010, semua institusi pendidikan dasar dan menengah sudah dapat menerapkan standar isi sesuai dengan Permendiknas No. 22 Tahun 2006. Pelaksanaan standar isi sesuai dengan tuntutan Permendiknas No.24

tahun 2006, ternyata tidak semua diiringi dengan implementasi KTSP dilapangan. Implementasi KTSP di satuan pendidikan, sebagaimana hasil observasi dan penelitian implementasi KTSP oleh penulis tahun 2008 menunjukkan beberapa klasifikasi.

.....

Problem konsep kurikulum menjadi salah satu perdebatan yang muncul di permukaan. Para supervisor KTSP menilai masih banyak yang belum mengimplementasikan KTSP di satuan pendidikannya. Di mana dokumen KTSP yang disusun hanya sebagai pemenuhan formal institusi dan dalam implementasikan belum menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap perubahan proses pembelajaran. Begitu juga bagi sebagian para pengajar mengatakan mereka telah mengembangkan KTSP secara lengkap dan telah disahkan oleh pihak terkait. Perdebatan ini bukan mencari kambing hitam dalam mengimplementasikan KTSP. Kita perlu menelusuri akar permasalahan yang muncul dan berkembang dalam praktek pendidikan ”.

Implikasi implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah perlunya pengembangan Silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) serta penilaiam yang menjadikan peserta didik mampu mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan Standar Kompetensi yang ditetapkan. Silabus adalah acuan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran, sedangkan penilaian mencakup indikator dan instrumen. Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan sangat menuntut kesiapan guru dan sekolah, jika tidak didukung oleh kesiapan guru dan sekolah , maka itu akan sia-sia. Pada kenyataannya sosialisasi KTSP belum merata ke seluruh guru, sehingga banyak guru yang masih belum memahami dengan baik apa dan bagaimana cara mengimplementasikan KTSP.

Perbedaan yang utama antara Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan kurikulum sebelumnya adalah dimana pada KTSP kurikulum dibuat dan disusun oleh guru di sekolah yang sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. Sekolah bersama guru diberi keleluasaan untuk menentukan dan menyusun sendiri kurikulum, namun tetap mengikuti ketentuan dari Pemerintah. Juga sekolah diberi kewenangan untuk mengelola



dan mengembangkan sendiri sekolahnya, sehingga sekolah dapat mandiri dengan pengelolaan manajemen berbasis sekolah (MBS). Sedangkan pada kurikulum sebelum KTSP, guru menggunakan kurikulum yang dibuat oleh pusat (Depdiknas). Guru tinggal mengimplementasikan dalam pembelajaran di kelas

Dalam implementasinya, KTSP akan mengalami hambatan-hambatan atau problematik dalam berbagai faktor, utamanya pada guru sebagai peran utama dalam implementasi di ruang kelas, hal itu dikarenakan tugas guru berbeda dengan tugas sebelumnya. Hambatan itu perlu ditelusuri apa akar permasalahannya sebagaimana diungkapkan pada bagian terakhir pada kutipan di atas. Hambatan ini tentunya akan berbeda antara suatu sekolah dengan sekolah yang lainnya, sangat tergantung kepada kondisi dan kemampuan masing-masing sekolah.

Dengan paparan hal-hal tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap SMK Wiraswasta yang berada di kota Cimahi, khususnya pada Program Keahlian Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri pada Mata Pelajaran Produktif kompetensi kejuruan Teknik Pemesinan, untuk diteliti bagaimanakah hambatan dalam implementasi KTSP yang dilaksanakan sejak tahun ajaran 2006/2007, khususnya di SMK Wiraswasta Cimahi. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, karena hingga saat ini menurut pengamatan penulis belum ada yang melakukan, khususnya di SMK Wiraswasta di kota Cimahi. Dengan penelitian ini akan diketahui sejauh manakah hambatan guru dalam implementasi KTSP di SMK tersebut. Dengan adanya penelitian ini diharapkan, hasilnya dapat dijadikan bahan masukan bagi yang berkepentingan seperti Lembaga P4TK BMTI Bandung, karena lembaga pemerintah ini mempunyai fungsi sebagai pembina SMK, khususnya pendidikan kejuruan dan teknologi. Selain itu juga bagi

sekolah itu sendiri, dengan adanya hasil penelitian ini sekolah dapat memperbaiki serta mengembangkannya yang sesuai dengan yang diharapkan.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh sekolah. Ini merupakan kebijakan baru dari pemerintah dalam rangka mengakomodasi kepentingan sekolah, daerah dan sekaligus untuk mengembangkan potensi masyarakat. Namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala atau hambatan yang secara umum meliputi antara lain manajemen kurikulum, organisasi dan manajemen sekolah, ketenagaan, sarana prasarana, peserta didik, pembiayaan, peran serta masyarakat, lingkungan dan kultur sekolah, dan unit produksi. Sebagaimana diungkapkan diatas bahwa hambatan ini tentunya akan berbeda anatara suatu sekolah dengan sekolah yang lainnya, sangat tergantung kepada kondisi dan kemampuan masing-masing sekolah.

Dengan demikian pada penelitian ini akan diteliti mengenai hambatan dalam implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan .Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :”Bagaimanakah hambatan yang dihadapi guru dalam implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada mata pelajaran produktif kompetensi kejuruan Teknik Pemesinan Program Keahlian Teknik Mekanik Industri di SMK Wiraswasta Kota Cimahi ”

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Penelitian yang dilaksanakan adalah tentang hambatan yang dihadapi guru dalam implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang menyangkut permasalahan guru dalm merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan melakukan

penilaian hasil pembelajaran dikelas. Menurut Mulyasa (2008:4) mengemukakan bahwa : "Keberhasilan atau kegagalan implementasi kurikulum di sekolah sangat bergantung pada guru dan kepala sekolah, karena dua figur tersebut merupakan kunci yang menentukan serta menggerakkan berbagai komponen dan dimensi yang lain.....dengan KTSP guru dituntut untuk membuktikan profesionalismenya, mereka dituntut untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan kompetensi dasar (KD)". Selanjutnya menurut Mulyasa (2008:7) mengemukakan bahwa :

" ...karena tidak jarang kegagalan implementasi kurikulum di sekolah disebabkan oleh kurangnya pemahaman guru terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berfungsinya kurikulum terletak pada bagaimana implementasinya di sekolah, khususnya di kelas dalam kegiatan pembelajaran yang merupakan kunci keberhasilan tercapainya tujuan ,serta terbentuknya kompetensi peserta didik. "

Dengan demikian pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada hambatan yang dihadapi oleh guru-guru mata pelajaran kejuruan Teknik Pemesinan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Hambatan yang dihadapi guru dalam mengembangkan dan menyusun Perencanaan Pembelajaran : Program Tahunan dan Program Semester, Silabus serta Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan ketentuan dalam KTSP
- b. Hambatan yang dihadapi guru dalam pembelajaran yang sesuai ketentuan dalam implementasi KTSP.
- c. Hambatan yang dihadapi guru dalam melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan KTSP.
- d. Kemampuan serta wawasan guru tentang konsep KTSP

#### **1.4. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan dan pembatasan masalah seperti tersebut diatas, maka pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya adalah :

- a. Bagaimana hambatan yang ada pada guru dalam hal mengembangkan atau menyusun Rencana Program Pembelajaran berupa Program Tahunan dan Program Semester, Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ?
- b. Bagaimana hambatan yang ada pada guru dalam hal melaksanakan pembelajaran yang sesuai KTSP ?
- c. Bagaimana hambatan yang ada pada guru dalam hal melakukan penilaian yang sesuai dengan KTSP ?.
- d. Bagaimanakah kemampuan dan wawasan guru tentang konsep KTSP ?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian dalam problematika implementasi KTSP ini adalah untuk melihat lebih dalam mengenai permasalahan yang ada atau terjadi yang dihadapi guru dalam implementasi KTSP Mata Pelajaran Produktif Program Keahlian Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri di SMK Wiraswasta Cimahi. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana hambatan yang dihadapi guru dalam hal mengembangkan atau menyusun perangkat KTSP, khususnya pada guru Program Studi Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri
- b. Untuk mengetahui sejauh mana hambatan yang ada pada guru dalam hal melaksanakan pembelajaran menurut KTSP pada Program Studi Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri .

- c. Untuk mengetahui sejauh mana hambatan yang ada pada guru dalam melakukan penilaian menurut KTSP di kelas.
- d. Untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran .

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi Sekolah Menengah Kejuruan khususnya pada Program Keahlian Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri. Begitu juga dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan pertimbangan dalam implementasi KTSP , baik bagi para kepala sekolah dan para guru sebagai orang yang terlibat langsung dalam implementasi kurikulum, maupun bagi kebutuhan penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam. Secara lebih rinci penelitian ini dibagi dalam dua macam, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

- a. Manfaat secara teoritis

Hasil suatu penelitian dapat dijadikan sebagai bahan penambahan wawasan keilmuan dalam bidang tertentu, walaupun hasilnya belum tentu dijadikan secara generalisasi. Suatu fenomena dalam pendidikan yang terjadi di tataran bawah mungkin akan sama dengan kaidah keilmuan dalam kependidikan. Dengan demikian diharapkan hasil dari penelitian ini sebagai pembuktian dari kaidah-kaidah kependidikan yang ada.

b. Manfaat secara praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari studi ini adalah agar dapat dijadikan bahan masukan sekolah yang bersangkutan :

1. Informasi yang diperoleh dari penelitian dapat memberi masukan bagi guru sebagai tenaga pengajar agar mengetahui kinerja masing-masing sebagai orang yang penting dalam implementasi KTSP dalam memenuhi tuntutan kualitas siswa. Kelebihan dan kekurangan dalam kinerja dapat dijadikan masukan dalam pembinaan lebih lanjut.
2. Memberikan masukan kepada pengembang kurikulum dalam membuat dan mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk mengembangkan kurikulum yang lebih baik.
3. Memberikan masukan kepada kepala Sekolah yang bersangkutan, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang hubungannya dengan implementasi KTSP di sekolahnya.